



# Buletin Parlementaria

Nomor 1218/IV/IX/2022 • September 2022



## Sahkan RUU PDP Jadi UU, DPR Jamin Negara Lindungi Data Setiap Warganya



3 Kunjungi Ponpes  
Mahasina, Puan  
Maharani: Santri  
Adalah Calon  
Pemimpin Indonesia



6 Pimpinan DPR  
Terima Surpres  
Pengganti Wakil  
Ketua KPK  
Lili Pintauli



9 772614 339005



# Sahkan RUU PDP Jadi UU, DPR Jamin Negara Lindungi Data Setiap Warganya

**R**ancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Usai mendengar laporan dari Pimpinan Komisi I DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk F. Paulus selaku pimpinan

”

**RUU TENTANG PDP BENAR-BENAR JADI LANDASAN HUKUM YANG KUAT DAN MEMASTIKAN BAHWA NEGARA MENJAMIN DAN MEMASTIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGANYA**

Rapat Paripurna pun menanyakan persetujuan kepada setiap fraksi di DPR RI terkait pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Lodewijk dalam Rapat Paripurna DPR RI di

Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9). Pertanyaan Lodewijk pun dijawab 'Setuju' oleh seluruh peserta Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam laporannya di Rapat Paripurna berharap, beleid baru itu menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi. "RUU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya," harap Kharis.

Kharis mengatakan, UU ini diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. "Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draf RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," pungkask politisi PKS tersebut.

"Kami selaku Pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota DPR, Pimpinan Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkominfo, Mendagri dan Menkumham beserta jajarannya. Tak lupa kepada akademisi dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung juga kepada Sekretariat Komisi I dan Setjen DPR RI," kata Kharis. ● tim/sf/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: JAKA/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat menyampaikan laporan pembahasan RUU PDP.

# Kunjungi Ponpes Mahasina, Puan Maharani: Santri Adalah Calon Pemimpin Indonesia



Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani saat berfoto bersama santri Ponpes Mahasina, Bekasi.

**K**etua DPR RI (H.C) Puan Maharani mengingatkan agar para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Qur'an wal Hadits yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat, belajar dengan baik agar bisa memberikan pengabdian terbaiknya untuk bangsa dan negara. Kedatangan Puan disambut sekitar seribu santriwan/santriwati sembari menyenandungkan salawat *Yaa Lal Wathan* secara bersamaan.

Didampingi pengasuh Ponpes Mahasina, Drs KH Abu Bakar Rahziz dan Nyai Badriyah Fayumi, Puan menyapa para santri. "Para santri adalah calon pemimpin Indonesia," ucap Puan di Ponpes Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Pondok Gede, Bekasi, Jabar, Rabu (21/9).

Menurut pengasuh Ponpes, salah satu program di Pondok Pesantren ini adalah kepemimpinan

dan karakter. Ponpes Mahasina pun memberikam pendidikan tanpa diskriminasi sehingga para santri yang belajar di pesantren tersebut datang dari berbagai latar belakang. "Saya gembira ada pendidikan karakter dan kebangsaan di Pesantren Mahasina. Tidak ada diskriminasi juga saya sangat senang. Kita akan ikut bantu agar pesantren ini makin berkembang," kata Puan.

Dalam kesempatan tersebut, seorang santriwati bernama Halimatul Syadiyah menyatakan ingin menjadi seperti Puan. Ia lalu bertanya bagaimana resep untuk bisa menjadi perempuan yang sukses. "Karena ada yang anggap perempuan di bawah laki-laki jadi *enggak pede* untuk tunjukkan kemampuannya," ungkap Halimatul yang meminta Kitab Dalilil Falihin (inti dari Kitab Riyadus Salihin) kepada Puan. • **hal/sf**



## PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pembertinaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos, (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Suciati, S.Sos, (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos, (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantil, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Ermilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubald Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setiantono, Taufan Syahrull, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonmaricha Fista Dysie, Balggys Maesynthia, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiatil, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geraldil Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Rapat Paripurna DPR Setujui Permohonan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk F. Paulus saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

**P**ermohonan naturalisasi Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2022–2023. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus yang memimpin Rapat Paripurna membacakan putusan tersebut setelah sebelumnya menanyakan persetujuan, yang kemudian dijawab 'setuju' oleh seluruh peserta Rapat Paripurna.

"Sesuai hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X DPR RI yang memutuskan menyetujui Pemberian Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada saudara Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh, sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah Permohonan Pemberian

Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh dapat disetujui?" tanya Lodewijk saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Keputusan ini diketahui sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi pada tanggal 19 September 2022 yang menugaskan Komisi III dan Komisi X DPR RI untuk membahas ke-2 surat presiden. "Berdasarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R26 dan R27 tanggal 17 Juni 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh, dan hasil pembahasannya selanjutnya

dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna," lanjut Lodewijk.

Diketahui, Jordi Amat merupakan seorang keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Barcelona, Spanyol. Pemain sepak bola berusia 30 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya. Sementara Sandy Walsh lahir di Belgia dari ayah kelahiran Inggris keturunan Irlandia, dan ibunya kelahiran Swiss-Belanda keturunan Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah pengembalian berkas kepada Presiden setelah adanya rekomendasi dari DPR RI. Nantinya Presiden akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberian status WNI kepada Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh yang kemudian diakhiri dengan pengambilan sumpah sebagai WNI oleh Kementerian Hukum dan HAM • **we/sf**



FOTO: JAKA/PDT

Pimpinan DPR RI berfoto bersama anggota Dewas BPKH dari unsur masyarakat periode 2022 - 2027 terpilih.

# Paripurna DPR Setujui 5 Calon Dewas BPKH Periode 2022-2027

**R**apat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus menyetujui laporan Komisi VIII DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) periode tahun 2022-2027 dari unsur masyarakat.

“Apakah laporan Komisi VIII DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewas BPKH dari unsur masyarakat periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui?” tanya Lodewijk yang disambut jawaban ‘setuju’ oleh Anggota DPR yang mengikuti Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan,

Jakarta, Selasa (20/9). “Selamat kepada calon Dewas BPKH semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas bertanggung jawab dan tetap amanah,” sambung politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan laporan Komisi VIII di hadapan Rapat Paripurna mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPKH dari unsur masyarakat periode 2022-2027.

“Kami melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewas BPKH dengan mengedepankan prinsip meritokrasi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang yang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. Kemudian, Komisi VIII menyeleksi calon yang memiliki

kompetensi dan integritas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan haji,” jelas Ashabul.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Dewan Pengawas BPKH terdiri atas tujuh anggota yang berasal dari profesional, dua orang dari unsur pemerintah dan lima orang dari unsur masyarakat. Oleh karena itu, mengacu kepada hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh calon yang diajukan Presiden, Komisi VIII PR RI melalui musyawarah untuk mufakat telah memilih dan menetapkan lima orang Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat pada tanggal 30 Agustus 2022 lalu.

Lima calon Dewas BPKH itu adalah Deni Suardini, Dr.,S.E,Akt, M.M, CFrA, CA, QIA, CGCAE; Heru Muara Sidik, Ak, CA, CMA, MM, QIA; M. Dawud Arif Khan, Dr; Mulyadi, Dr.,S.E.M.M.M. Si,Akt., CA., CPMA., SAS; dan Rojikin, Dr., S.H, M.Si., QIA. “Demikianlah laporan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan haji serta lima orang yang terpilih dan ditetapkan,” kata Ashabul menutup laporannya. ● **rnm/sf**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Pimpinan DPR Terima Surpres Pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa

pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI terkait nama yang akan menggantikan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar.

"Memang saya sudah dapat

kabarnya bahwa Surpres itu sudah masuk, tapi kita belum rapimkan," kata Dasco di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9). Ia menjelaskan, surpres akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk dibahas pada pekan depan.

DPR RI akan menggelar

Rapim untuk membahas Surpres tersebut dalam waktu dekat.

Setelah dibawa ke Rapim, Pimpinan akan memberi

penugasan kepada Komisi teknis terkait, yaitu Komisi III. Sehingga mekanismenya diserahkan kepada Komisi III yang nanti akan memprosesnya. "Senin akan ada Rapim lalu mekanisme akan diserahkan kepada Komisi III yang akan memproses," katanya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan belum melihat Surpres itu, sehingga belum mengetahui nama dan jumlah yang dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Lili sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut. "Diterimanya (surpres) kalau *enggak* salah Kamis. Nanti kita akan umumkan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengirim Surat Presiden (Surpres) terkait calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli. Menteri Sekretaris

”

**SURPRES AKAN DIBAWA KE RAPAT PIMPINAN (RAPIM) DPR UNTUK DIBAHAS PADA PEKAN DEPAN. DPR RI AKAN MENGGELAR RAPAT PIMPINAN (RAPIM) UNTUK MEMBAHAS SURPRES TERSEBUT DALAM WAKTU DEKAT.**

Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan Surpres tersebut telah dikirimkan ke DPR pada pekan lalu.

"Sudah disampaikan ke DPR Surpres-nya, ada Surpres-nya sudah disampaikan ke DPR," kata Pratikno. Sebagai informasi, Lili mundur sebagai Wakil Ketua KPK pada 11 Juli 2022, Jokowi pun telah meneken surat Keputusan Presiden (Kepres) soal pemberhentian Lili itu. • **ann/aha**

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.



FOTO: YOGA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Demi Nama Baik Bangsa, Gus Muhaimin Dorong Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

(Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk terus melakukan penguatan perlindungan juga fasilitas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Gus Muhaimin menyatakan, salah satu cara mewujudkan perlindungan itu adalah dengan memastikan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri agar lebih berdaya saing.

"Demi nama baik bangsa kita, maka kompetensi tenaga kerja kita harus ditingkatkan. Fasilitas dan sarana serta dukungan pemerintah kepada pekerja migran juga harus meningkat," kata Gus Muhaimin, saat menghadiri pelepasan 490 PMI G to G Korea, di Jakarta, Senin (19/9).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyatakan, sejatinya PMI memiliki titel pahlawan devisa. Ia berujar bahwa PMI seperti halnya pahlawan kemerdekaan yang harus terjamin keamanannya. Bank Indonesia mencatat Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah China dan Filipina. Remitansi yang diterima dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai 11,4 miliar dolar Amerika Serikat (2019) atau bertumbuh 21 persen terhadap kurun waktu lima tahun sebelumnya.



FOTO: IST/PTD

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri pelepasan 490 PMI G to G Korea.

"PMI kita di tempat mereka bekerja harus terjamin juga keamanannya. Tapi nyatanya PMI kita masih saja rentan terhadap berbagai risiko, seperti gagal ditempatkan, ancaman penghentian kontrak maupun cuti tanpa dibayar. Ini mau tidak mau harus diperhatikan betul oleh pemerintah," tutur legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Gus Muhaimin juga mendukung anggaran untuk BP2MI ditambah.

Diungkapkannya program pengawasan untuk PMI yang berjumlah sangat banyak tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. "Oleh karena itu sangat penting dipahami oleh para penentu anggaran ini, Kementerian Keuangan terutama, Komisi IX dan juga Badan Anggaran untuk betul-betul memperhatikan BNP2TKI (BP2MI)," tukas Gus Muhaimin. ● **uc/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Komisi I Pantau Perkembangan ASO di Sumut

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto melakukan monitoring sekaligus memantau perkembangan pelaksanaan penghentian siaran televisi analog atau *Analog Switch Off* (ASO) di Sumatera Utara.

"Kunjungan ini bertujuan untuk dapat berdialog dengan masyarakat dan beberapa pihak, sebagai upaya mendengarkan langsung perkembangan dan kemajuan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)," jelas Utut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI Usman Kansong, lembaga penyiaran publik (LPP) dan pihak terkait lainnya, di Kota Medan, Sumut, Kamis (15/9).

Utut menambahkan akan mendorong kebersamaan langkah pemangku kepentingan dalam menyukseskan perpindahan atau migrasi siaran televisi analog ke digital. "Kunjungan kerja ini

diharapkan akan mendorong kebersamaan langkah pemangku kepentingan menyukseskan perpindahan atau migrasi siaran televisi analog ke digital. Upaya ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 60A ayat 2, yang berisi mandat pengakhiran siaran TV Analog di 2 November 2022 untuk

**Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.**

beralih ke siaran digital", ungkap politis PDI-Perjuangan itu.

Untuk diketahui, Kominfo tidak lagi menggunakan istilah tahapan untuk migrasi TV analog ke digital. Tetapi *multiple* ASO atau dilakukan pada daerah yang telah siap melaksanakannya. Namun begitu, batas akhir pelaksanaannya tetap 2 November 2022. Dalam pertemuan turut hadir LPP swasta maupun publik, jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, termasuk Gabungan Pengusaha Barang Elektronik (GABEL), serta beberapa komunitas dan kelompok masyarakat. • **mri/sf**



FOTO: MENTARI/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi I Pantau Progres Migrasi ASO di Sulsel



FOTO: DEVI/PDT



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat pertemuan dengan mitra kerja Komisi I DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan.

**T**im Kunjungan Kerja Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, Stafsus Menkominfo, Direktur Penyiaran TVRI, Direktur Teknik TVRI, Direktur Teknik Metro TV, Direktur Utama MNC, Ketua KPID Sulsel, dan Komisioner KPI guna membahas progres laporan migrasi *Analog Switch-Off* (ASO) atau penghentian siaran analog dan beralih ke siaran digital di Provinsi Sulawesi Selatan.

Usai pertemuan tersebut, Kharis menyampaikan Komisi I DPR RI mendorong agar Kominfo RI dalam pelaksanaan ASO di Sulawesi Selatan maupun diseluruh Indonesia dapat dilakukan dengan baik, berkelanjutan, sesuai perencanaan dan tepat waktu. "Panja Digitalisasi Penyiaran juga mendorong Kemkominfo RI dalam pelaksanaan komitmen distribusi *Set Top Box* (STB) diseluruh Indonesia supaya tetap dilakukan sesuai dengan rencana, tepat sasaran dan tepat waktu," tutur Abdul Kharis di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (15/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi

I DPR RI mendorong jajaran Kominfo RI untuk berkonsolidasi dengan para penyelenggara multipleksing terutama untuk mengatasi mekanisme pelaksanaan distribusi STB dan isu lainnya di lapangan agar dapat diselesaikan secara tepat, cermat dan transparan.

"Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI mendorong Kominfo RI untuk mencari solusi antisipatif terhadap kemungkinan tidak terpenuhinya penyediaan STB sesuai target. Poin-poin ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Tim Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI dalam rapat dengan mitra kerja terkait," ungkap legislator dapil Jateng V itu. • **dep/aha**

# Mohammad Toha: Dokumen Warkah Harus Terbuka

**A**nggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengungkapkan salah satu permasalahan tanah yang ada saat ini karena ketidakterbukaan dokumen warkah. Ia memaparkan kasus permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Jawa Timur misalnya, yang dikenal dengan surat hijau, dan permasalahan pertanahan antar warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo (Warjoyo) yang jumlahnya lebih dari lima ribu orang dengan PT KAI.

"Ini terjadi salah satunya karena ketidakterbukaan dokumen warkah. Dokumen warkah itu sebenarnya terbuka bagi siapapun, bisa mengaksesnya. Dengan terbukanya dokumen warkah, maka bisa duduk bareng, dibicarakan antar kedua

belah pihak. Sehingga tidak harus masuk ke pengadilan," ungkap Toha saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI mengunjungi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Timur, di Surabaya, baru-baru ini.

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan jika tidak dibiarkan akses untuk melihat dokumen warkah itu sejatinya bisa dilaporkan ke Ombudsman. Selain itu ia menilai bahwa segala permasalahan pertanahan nasional itu butuh *good will* (niat baik) dari pemerintah.

Dengan kata lain harus ada penanganan dari koordinator utama dari bidang pertanahan itu sendiri, yakni Menteri ATR/BPN, Kejaksaan dan Menteri Keuangan. Pasalnya,

negara sudah menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

"Saya minta Pak Menteri datang langsung ke lokasi, setidaknya kesini (BPN Kanwil Jawa Timur) untuk merekapitulasi semua persoalan pertanahan yang ada. Mungkin penyelesaiannya tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak harus ada kemajuan dari penyelesaian pertanahan ini. Dan kami akan terus memantau, mengingat sudah dua kali juga hal ini diadakan ke DPR. Kami akan mendorong terus penyelesaian masalah ini," pungkasnya.

Diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

Jadi, secara umum warkah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata. Untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantah. ● ayu/aha



FOTO: AYU/PTD

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha.



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Pemberantasan Narkoba di Kalteng Harus Lebih Ditingkatkan



FOTO: TIARA/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Kalimantan Tengah.

Scan QR untuk berita selengkapnya



**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta penegakan hukum di bidang pemberantasan narkoba di provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk terus ditingkatkan. Pasalnya menurut laporan yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2016-2021 mencapai Rp600 triliun, dan sebanyak 7 persen peredaran uang narkoba berada di Kalteng.

"Dari tahun 2016-2021 tersebut dibagi enam per tahunnya sebesar Rp66,6 triliun, peredaran uang narkoba di Kalteng ada 7 persen dari Rp66,6 triliun tersebut, sehingga ada Rp4 triliun setahunnya, ini perlu atensi Kapolda Kalteng. Oleh karena itu Kita harapkan Kapolda harus kerja keras lagi memberantas narkoba

di Kalteng," ungkap Pangeran usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalteng beserta jajaran, di Palangka Raya, Kalteng, Jumat (16/9).

Sementara terkait penanganan tindak pidana perjudian *online* maupun konvensional oleh Polda Kalteng, Pangeran menilai tidak terlalu signifikan. Untuk diketahui dalam operasi penindakan bulan Agustus lalu, jajaran Polda Kalteng berhasil mengamankan 57 bandar judi dari berbagai jenis, dengan barang bukti yaitu uang sebesar Rp42 juta, 6 unit *gadget*, 19 buah mata dadu, serta enam buah lapak judi.

"Pengungkapan kasus judi *online* maupun konvensional dalam skala besar baik dari sisi omzet sindikat judi maupun dalam perspektif pengungkapan tindak pidana hasil pencucian uang dari

praktik perjudian, penting dilakukan Polda Kalteng dengan lebih massif sebagai bentuk keseriusan sekaligus sebagai upaya membersihkan institusi Kepolisian dari isu-isu sebagaimana yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini," imbuh politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalteng Nanang Avianto menyampaikan melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Kalteng, menjadi bahan introspeksi, khususnya bagi Polda Kalteng. "Apa yang dipertanyakan juga sudah kami jelaskan sebagai bentuk transparansi di dalam melakukan kegiatan kami kedepannya. Kami ucapkan terima kasih mendapatkan saran dan masukan yang akan berguna untuk kegiatan Polda Kalteng kedepannya dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum yang berkeadilan," harapnya. ● **tra/aha**

# Komisi IV Dampingi Gakkum KLHK Segel 12 Lokasi Hutan Bekas Tambang Bauksit di Bintan

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi IV Sudin bersama Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau lokasi bekas tambang bauksit dan menyaksikan penyegehan dan pemasangan plang di 12 titik lahan eks tambang bauksit di Kampung Gisi, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (15/9).

"Di lahan hutan lindung seluas 4,3 Hektare (Ha) ini hasil buminya telah ditambang dan dikeruk sejumlah perusahaan pada 2019 tahun lalu. Kami dari Komisi IV DPR RI bersama Gakkum KLHK turun melakukan penyegehan dan disaksikan oleh Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan bersama beberapa OPD Bintan serta OPD Pemprov Kepri," terang Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan ada 12 titik lokasi lahan hutan di Kabupaten Bintan yang akan disegel dan dipasang plang oleh Gakkum KLHK. Lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan yang sudah ditambang. "Kita akan segel 12 titik lokasi dan saat ini baru 5 lokasi yang kita pasang plang segel. Tinggal 7 lokasi lagi nanti kita minta Gakkum

KLHK segera disegel," tandas Sudin.

Di 12 titik lokasi lahan hutan lindung seluas 300 hektar itu, lanjut Sudin, juga telah dijarah dan tambangnya dikeruk sejumlah perusahaan pemilik pertambangan yang saat ini telah dihukum pidana. "Jadi lahan itu sudah diidentifikasi oleh Gakkum KLHK. Selain di Kampung Gisi juga ada di pulau-pulau seperti Koyang dan Telang. Hingga kita minta agar Gakkum KLHK menyegelnya supaya lahan tersebut tidak dikelola kembali," tegas Sudin. • oji/aha



Ketua Komisi IV Sudin saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Kampung Gisi, Bintan, Kepri.

Scan QR untuk berita selengkapnya



## Produktivitas Tebu di Wilayah Malang dan Batu Butuh Perhatian Khusus

**W**

akil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini

menyampaikan bahwa ia ikut merasakan keprihatinan yang dirasakan para petani tebu di Jawa Timur, khususnya di area Malang dan Batu terkait turunnya produktivitas

# Cara Kelola Pelestarian Hutan Adat Tenganan Pegringsingan Perlu Dicontoh

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, untuk mengelola pelestarian hutan di Indonesia perlu mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Provinsi Bali. Karena, mereka sudah ratusan tahun, bahkan turun temurun sampai hari ini berhasil menjaga kelestarian hutannya sendiri. Tidak hanya itu, hutannya juga dikelola dengan baik sehingga memiliki manfaat bagi lingkungan masyarakatnya, jadi Indonesia tidak perlu jauh-jauh belajar ke luar negeri.

"Saya dari dulu pada setiap rapat kerja selalu menyampaikan, kita cukup belajar pada diri kita yaitu

para leluhur. Misalnya di Bali kuno yang saya kunjungi tadi itu secara original mengajarkan tentang dua hal. Pertama adalah lingkungan yang tertata, ini berarti manusia memiliki hubungan dengan alam secara kuat. Kedua, ekonomi yang terjaga dari alam yang melahirkan kesejahteraan masyarakat, itu bisa dilihat dari setiap pekarangan yang disiapkan untuk warga. Kemudian, ada sawah yang dikelola secara adat, lalu berasnya dibagi-bagi dalam setiap bulan," ujar Dedi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR mengunjungi Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Kabupaten, Karangasem, Bali, Kamis (16/9).

Menurut politisi Partai Golkar ini, pola seperti itu mestinya diterapkan

di seluruh Indonesia. Perlakuan negara terhadap mereka juga harus diatur dalam sebuah aturan untuk menjaga dan jangan merubah tata ruangnya untuk digunakan untuk kepentingan lain, negara tugasnya adalah satu, melindungi para pengelola adat.

Untuk itu, Dedi meminta agar dalam revisi Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem nanti memberikan ruang bagi adat untuk terus mengalami pertumbuhan dan mendapat fiskal. • **jk/aha**



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat mengunjungi Hutan Adat Tenganan Pegringsingan di Karangasem.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Kota Batu.

tebu akibat kurangnya lahan, padahal kenyataannya pabrik gula di Jawa Timur terbilang cukup banyak.

"Presiden pernah bilang bahwa harusnya kita bisa menjadi swasembada gula karena produksi tebu yang banyak khususnya di provinsi Jawa Timur. Masalahnya adalah pasokan tebu sangat kurang, padahal sudah ada pabrik gula di beberapa wilayah di Jawa Timur," ungkap Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Batu, Kamis (15/9).

"Jadi tentu pada pertemuan kali ini kita membutuhkan informasi untuk dijadikan landasan dan dirapatkan di Jakarta. Kita Komisi IV punya komitmen sangat kuat terhadap petani tebu," imbuhnya. Anggia juga merasa sangat aneh

dengan kebijakan pemerintah yang menghapus peraturan pabrik gula baru harus mempunyai lahan minimal 20 persen.

Menurutnya saat ini banyak pabrik tebu yang bermunculan namun sebenarnya bahan baku sangat kurang. Banyaknya pabrik gula namun pasokan tebu yang kurang diibaratkannya sebagai tebu wisata. "Mereka punya pabrik tapi tidak punya lahan binaan sendiri, jadi tebu dari Malang dikirim ke Madiun, dari Madiun ke Blitar, dari Blitar ke Malang lagi, ini yang disebut tebu wisata," tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. **skr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi V Tinjau Pembangunan Pelabuhan Sanur Bali

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, Kunjungan

Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bali kali ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan pada tahun-tahun 2019 lalu ke Sanur, Bali. Oleh karena itu kedatangan Tim Komisi V DPR RI ke Sanur ingin melihat langsung perkembangan kondisi terkini pembangunan Pelabuhan Sanur serta menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

"Kehadiran Komisi V DPR RI sebagai wujud dukungan untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang aman dan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat berdialog dengan Kadishub Bali dan jajaran Kemenhub.

nyaman, Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Perhubungan Laut, maupun *stakeholder* yang terkait,

agar dalam pembangunan prasarana transportasi," kata Ridwan saat berdialog dengan Kadishub Bali dan



# Komisi V Tinjau Pembangunan Bendungan Semantok

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw bersama

tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Semantok yang berada di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (15/9).

"Kami hadir di Nganjuk dalam rangka Kunjungan Spesifik untuk melihat salah satu proyek nasional,

dari 201 proyek nasional, waduk ini salah satunya, dan hari ini kami melihat bahwa proyek ini sudah diharapkan bisa selesai 2022 ini, tadi kami sudah tanyakan," ujar Roberth.

Roberth menilai proyek bendungan waduk skala nasional tersebut berharap akan membawa suatu manfaat besar bagi masyarakat. Menurut politisi Partai NasDem tersebut, bendungan waduk yang dibangun ini berguna akan bisa mengatasi



FOTO: ANJU/PDT

Denpasar, dan direktur kepelabuhan Kemenhub, di Bali, Kamis (15/9).

Khususnya, Pelabuhan Sanur ini, terang politisi Partai Golkar itu, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan standar dan kualitas konstruksi yang baik. Pihaknya berharap agar pemanfaatan Pelabuhan Sanur ke depan dapat menunjang pariwisata Bali, serta mempercepat bergeraknya perekonomian masyarakat, serta menyambut perhelatan G20 di Bali.

Di tempat yang sama Direktur Kepala Pelabuhan Kemenhub Subagiyo menerangkan saat ini proyek yang digarap secara kumulatif telah mencapai 93 persen. sesuai rencana pada saat ini harusnya progres baru mencapai 88,9 persen artinya progres ini mengalami deviasi atau maju dari rencana sebesar 4 persen. "Proyek ini dibangun juga berkat dukungan dari Komisi V DPR RI yang telah memberikan berbagai usulan untuk realisasi proyek," lapor Subagiyo kepada Komisi V DPR RI. • **afr/aha**

banjir dan pada saat musim kemarau juga menjadi solusi untuk masyarakat Nganjuk dan sekitarnya.

"Waduk ini akan digunakan juga untuk menjadi air baku untuk masyarakat di sini. Dan bisa menjadi solusi kalau terjadi kekeringan. Maka ini bisa menjadi untuk disalurkan ke persawahan yaitu bisa tadi sudah disampaikan kita 1900 hektar yang akan dialiri untuk petani agar produktivitas petani itu tidak terganggu kalau nanti musim kemarau," kata legislator daerah pemilihan Papua itu. • **aas/aha**

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw.**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan Bendungan Jlantah



Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin saat memimpin Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Jlantah.

**A**nggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menyatakan pihaknya mendukung rencana percepatan pembangunan Bendungan Jlantah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai komitmen memenuhi kebutuhan air baku, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

"Tahun 2023 Bendungan ini akan selesai, mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga kemanfaatan bendungan ini bisa segera digunakan oleh khususnya masyarakat Karanganyar atau mungkin kabupaten yang lain," ungkap Hamid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (15/9).

Hamid yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV itu juga mendorong agar pemerintah juga dapat segera melakukan pembayaran dan menyelesaikan ganti rugi lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan. "Kami mendorong agar pembangunan ini sukses tanpa eksekusi, artinya dengan masyarakat yang punya lahan segera diselesaikan ganti rugi dan untungannya," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Bendungan Jlantah yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang memiliki area genangan seluas 50,45 hektare ini rencananya akan dimanfaatkan untuk irigasi lahan, penyediaan air baku dan mereduksi banjir di Kecamatan Jatiyoso, Jatipuro dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), konservasi air serta destinasi pariwisata. • **rr/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VI Tinjau Perkembangan Kinerja PT INKA, Pelindo, PNM dan PTPN XII di Banyuwangi

**K**omisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan atas perkembangan kinerja ke PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelabuhan Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII. Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, pihaknya hendak melihat perkembangan kinerja BUMN yang ada di Banyuwangi, terutama yang terdampak Covid-19.

Dalam pertemuan yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (15/9) tersebut, lanjut Faisol, Komisi VI DPR RI menanyakan kepada PT INKA mengenai pengembangan pengelolaan produk transportasi khusus kereta api, yang kini mengembangkan mobil listrik dan produk lain yang dijual di dalam dan luar negeri. Termasuk pada tahun 2019, PT INKA membangun *workshop* di Banyuwangi, namun karena pandemi belum ada perkembangan.

"Kami memahami kondisi ini, namun, kini kami berharap INKA bisa fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka kemajuan perindustrian di Kabupaten Banyuwangi, yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, serta dapat membantu perekonomian masyarakat di Banyuwangi," kata Faisol.

Kemudian, kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero),

Faisol menanyakan mengenai progres pembangunan Boom Marina Banyuwangi yang dipersiapkan menjadi prototipe pengembangan marina nasional di Indonesia. "Boom Marina memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pelabuhan *yacht* dan prototipe marina nasional. Karena itu kita perlu mengetahui progres pembangunan ini. Selain itu kita perlu melihat bagaimana PT Pelindo dalam membina UMKM di Banyuwangi," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. •

rnm/sf



Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza.

FOTO:RIA/PDT



## Dukungan Swasembada Pangan Belum Maksimal, Komisi VI Berharap Persoalan Perhutani Segera Selesai

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menilai dukungan pada swasembada pangan, dalam hal ini dari sektor gula

dirasa masih belum maksimal, dikarenakan masih ada persoalan konflik sosial di lapangan yang belum diselesaikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Sarmuji menambahkan, pihaknya juga ingin mendalami kesiapan Perhutani

# Komisi VI Harap Kinerja PT PI Utilitas Lebih Optimal



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung memimpin Komisi VI DPR RI meninjau PT PI Utilitas.

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung menyoroti kinerja PT Pupuk Indonesia Utilitas (PI Utilitas) yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia. Menurutnya meski perusahaan yang menyuplai energi ke anak

perusahaan lain di bawah PT PI tersebut secara kinerja keuangan menghasilkan laba, namun ia menilai masih banyak hal yang harus dioptimalkan utamanya menyikapi dinamika bisnis yang terjadi saat ini. "Hari ini melihat bahwa salah satu anak usaha PT Pupuk yaitu PT Pupuk Indonesia Utilitas memproduksi energi dan juga gas,

untuk khususnya ke Petrokimia Gresik dan juga Pupuk Kaltim. Kami juga menyoroti bahwa terkait kinerja perusahaan, walaupun memang laba, tapi masih banyak yang perlu dioptimalkan dan juga ke depan untuk menyikapi dinamika bisnis dan juga global," kata Martin usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT PI Utilitas di Gresik, Kamis (15/9).

Untuk mengoptimalkan kinerja tersebut, menurut Martin, PT PI Utilitas perlu melakukan diversifikasi usaha dan memperluas jangkauan usahanya. Sehingga nantinya tidak hanya menyuplai energi kepada anak perusahaan naungan PT PI saja. "Pupuk Indonesia Utilitas ini harus bisa melakukan diversifikasi usaha, supaya juga bisa memperluas layanannya, karena selama ini mereka hanya menyuplai energi dan juga gas ke internal Pupuk Indonesia sendiri, jadi kita menginginkan ke depan agar Pupuk Indonesia Utilitas ini punya *scope* bisnis yang lebih luas dan lebih menguntungkan," imbuh politisi Partai NasDem itu. • **bia/sf**



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.

dalam memberikan dukungan pada swasembada pangan dari komoditas gula. Karena menurutnya ada banyak lahan Perhutani yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Nah yang begitu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pada swasembada pangan kita, khususnya pada hal ini

gula yang bisa ditanam dilahan-lahan Perhutani, itulah sebenarnya yang ingin kita dalam dan tentu saja masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Perhutani saja, karena banyak persoalan yang mesti diselesaikan dengan kementerian dan lembaga yang lain," kata Sarmuji usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Perum Perhutani di Malang, Jawa Timur, Kamis (15/9).

Politisi Partai Golkar tersebut juga menjelaskan terkait dengan adanya merger di beberapa anak perusahaan Perum Perhutani dan mendorong agar Perum Perhutani berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan

kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. "Jadi ada merger di beberapa anak perusahaan tentu kita ingin memantau perkembangannya seperti apa," tanya Sarmuji.

"Kemudian kita juga ingin mendengarkan penjelasan dari Perhutani tentang persoalan-persoalan yang ada di lapangan, karena Perhutani itu persoalan di lapangannya sangat kompleks. Lahan hutannya berada di sekitar pemukiman masyarakat, lalu kadang-kadang ada konflik sosial di lapangan dan sebagainya. Banyak sekali problem di lapangan, kita ingin mendengarkan bagaimana Perhutani mengelola lahan terutama sebagian lahan yang diperuntukkan bagi masyarakat perhutanan sosial," tandas legislator dapil Jawa Timur VI itu. • **ron/sf**



# Komisi VII Apresiasi Berbagai Inovasi Produk PT Indofood

**W**akil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi berbagai inovasi pengembangan produk yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. Ia menilai perusahaan terus memberikan kontribusi secara langsung terhadap masyarakat setempat, seperti program *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara besar-besaran.

"Kita melihat PT Indofood terus berinovasi dalam hal

mengembangkan produk sendiri. Hal ini penting mengingat persaingan



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunспек Komisi VII DPR RI ke PT Indofood.

pasar semakin ketat, sehingga varian produk tidak boleh statis. Selain itu, pengembangan produk diikuti dengan program kemitraan terhadap petani setempat. Artinya, selama ini perusahaan juga terus memberikan kontribusi yang besar kepada kesejahteraan masyarakat luas," tutur Eddy saat memimpin Kunспек Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Indofood di Jambi, Kamis (15/9).

Politisi PAN ini mengatakan, PT Indofood juga telah berekspansi ke



## Tinjau Pertambangan di Sulawesi Selatan, Komisi VII Tekankan Penerapan *Good Mining Practice*

**K**omisi VII DPR RI melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tim kunjungan kerja kali ini diketuai oleh Anggota Komisi VII DPR RI Andi Ridwan Wittiri yang melakukan peninjauan lapangan dan pertemuan dengan Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Selain untuk melihat secara langsung kegiatan operasional PT Vale Indonesia Tbk, juga untuk memastikan agar PT Vale Indonesia Tbk menerapkan kaidah-kaidah *Good Mining Practice* dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan," ungkap Andi Ridwan, saat kunjungan berlangsung di area pertambangan PT Vale Indonesia, Sorowako, Kamis (15/9).

Pada aspek *Good Mining Practice*, selain menaati regulasi dan cara kerja pertambangan,



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Ridwan Wittiri saat memimpin Kunспек ke PT Vale Indonesia Tbk.

luar negeri. Melihat hal ini, Komisi VII DPR RI tidak hanya mengapresiasi, melainkan memberikan dukungan supaya dapat meningkatkan pangsa yang signifikan di pangsa ekspor. "Kalau kita melihat ke pangsa ekspor, artinya sudah saatnya produk Indonesia dapat bersaing menembus pasar global. Hal ini nantinya juga berdampak luas pada keberlangsungan bisnis perusahaan (PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk), sekaligus membawa nama baik Indonesia juga pastinya," tegas Eddy.

Eddy melanjutkan, Komisi VII DPR RI juga menegaskan supaya PT Indofood juga perlu menjaga dan mementingkan aspek kesehatan dari masyarakat yang telah mengonsumsi produknya. Diikuti dengan harga yang bersahabat *dikantong* masyarakat luas. "Melihat begitu banyaknya kompetitor di sektor pengembangan produk mie instan, justru kompetisi yang sehat dibutuhkan, agar masyarakat dapat merasakan langsung," tutup Eddy. • **dip/sf**

menurut politisi PDI-Perjuangan itu, perusahaan nikel tersebut juga punya motivasi positif dengan mengupayakan penggunaan energi hijau (green energy) dengan menginisiasi penggunaan truk elektrik. "Mereka juga punya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan tidak pakai bahan bakar fosil untuk pembangkitnya," terang Andi Ridwan.

Bahkan PLTA milik PT Vale Indonesia Tbk dengan daya 365 Megawatt sekitar 10 Megawatt disalurkan kepada PT PLN (Persero), dimana hasil penjualan listrik itu diberikan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah Luwu Timur. Untuk hal tersebut, Andi mengapresiasi tindakan perusahaan dan berharap PT Vale Indonesia Tbk dapat terus meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat sekitar. • **aha**

# Tinjau Gresik Gas Cogeneration Plant, Komisi VII Minta Pupuk Mudah Diperoleh Petani

**A**nggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Gresik Gas Cogeneration Plant (GGCP), di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tifatul menyampaikan, kunjungan ini dalam rangka melihat kinerja PT Pupuk Indonesia Utilitas (PI Utilitas) dan memastikan subsidi gas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola pupuk dapat dengan mudah diperoleh masyarakat, khususnya petani.

"PT Pupuk Indonesia Utilitas ini kan mendapatkan pasokan gas bersubsidi dari pemerintah dengan harga 6 USD per barrel. Oleh karena itu, kita ingin pupuk ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Pupuk ini jangan sampai sulit diperoleh rakyat, jangan sampai rakyat justru berhadapan dengan mafia-mafia

pupuk," tutur Tifatul usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke GGCP, di Gresik, Jawa Timur, Kamis (15/9).

Tifatul menambahkan, PI Utilitas kini sedang melaksanakan diversifikasi usaha, sehingga hal ini perlu dibahas lebih lanjut dalam Rapat dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI di Senayan. "PT Pupuk Indonesia Utilitas ini kan bagian dari PT Pupuk Indonesia, anak perusahaan yang kinerjanya cukup bagus. Mereka bisa menghasilkan listrik sampai 22 megawatt meskipun yang dipakai hanya sekitar 13 megawatt. Nanti akan kita bicarakan, ini sisanya akan dikemanakan. Dipakai di internal boleh, tetapi harus menghasilkan sesuatu," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisi VII DPR RI berharap PI Utilitas ini akan terus berkembang, berekspansi sehingga menghasilkan produk yang lain yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita berharap ke depan, PT Pupuk Indonesia Utilitas ini tentu semakin besar karena kebutuhan masyarakat yang semakin besar. Baik dalam hal energy (energi), food (makanan) yang berasal dari hasil pupuk dan juga water (air)," pungkas

Tifatul. • **ais/sf**



Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring.

FOTO: AISYAH/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Komisi X Serap Aspirasi Terkait Tata Kelola Perguruan Tinggi

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi X DPR salah satunya kesenjangan antara PTN dan PTS. Padahal, peran perguruan tinggi swasta dalam sistem pendidikan nasional sangat signifikan.

Untuk memenuhi tuntutan SDM yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, dunia

pendidikan terutama pendidikan tinggi dituntut dapat menjamin mutu dan kualitas pendidikan tinggi. Karena itu, menurut Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, PTS perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari seluruh pihak dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi.

"Ini akan menjadi bahan kita nanti untuk ke depan agar dengan anggaran yang terbatas, kita tetap bisa memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi bukan hanya negeri tetapi juga swasta," kata

Hetifah usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X di Bandung, Jabar, Jumat (16/9). Hetifah juga mengingatkan perguruan Tinggi perlu memperhatikan permasalahan terkait mutu, relevansi, tata kelola hingga daya saing. • **ann/sf**



FOTO: ANNE/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi X Serap Masukan PTN dan PTS di Yogyakarta



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

FOTO: UPI/PDT

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyerap aspirasi, keluhan dari beberapa rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menggarisbawahi, perguruan tinggi yang membantu tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kini sedang kesulitan, sehingga perlu mendapat dukungan.

"Perguruan tinggi negeri terutama yang swasta ya jauh lebih besar dari segi sisi jumlah mahasiswa mereka juga mestinya mendapatkan support dari negara dalam hal ini pemerintah dari segi finansial atau

anggaran," kata Fikri usai pertemuan Komisi X DPR RI dengan rektor maupun sivitas akademika beberapa perguruan tinggi se-Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Jumat (16/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jika dilihat dari segi jumlah PTN dan PTS di Yogyakarta, sangat representatif mewakili Indonesia di kancah internasional. Sehingga jika perguruan tinggi di Yogyakarta ingin bersaing dengan perguruan tinggi dari negeri lain bisa dilakukan melalui penguatan riset. Fikri mengakui dana riset untuk perguruan tinggi sedikit, untuk itu Komisi X DPR RI akan menyampaikan hal tersebut kepada Kemendikbud Ristek. • **upi/sf**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Baleg dan Pemerintah Setujui Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023



FOTO: DEW/PDT

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima pandangan pemerintah terkait Prolegnas 2023.

Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panja Penyusunan Prolegnas Willy Aditya menyampaikan, Baleg dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022, dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 telah membicarakan dan membahas semua usulan RUU tersebut dalam Rapat Panja yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus dan 6 September 2022 lalu.

Pendapat dan pandangan yang mengemuka dalam pembicaraan dan pembahasan Rapat Panja, antara lain terkait dengan Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022; RUU usul DPR RI, Pemerintah, dan DPD RI; serta rasionalitas penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, jumlah RUU dalam daftar tunggu, jumlah RUU yang diusulkan, serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan Anggota Panja, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI. • rnm/sf

Scan QR untuk berita selengkapnya



Rapat Kerja Badan Legislatif (Baleg) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly

dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Prioritas Tahun 2022 sebanyak 32 RUU; Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 38 RUU; serta Prolegnas RUU Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 257 RUU.

"Dengan disetujuinya Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, berakhir pula acara Rapat Kerja pada hari ini dan selanjutnya hasil kesepakatan ini akan kita laporkan dalam Rapat

Paripurna DPR RI terdekat," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat membacakan kesimpulan rapat kerja di, Ruang

## Efektivitas Kebijakan Distribusi BBM Bersubsidi Melalui Aplikasi MyPertamina

Negara memberikan subsidi BBM dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga yang layak. Dalam hal ini Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi harga untuk 2 (dua) jenis (BBM), yakni Biosolar dan Pertalite sebagaimana telah diatur Kepmen ESDM No.37/K/HK/02/2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang telah dicabut sebagian melalui Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/2022 tertanggal 3 September 2022.

Seiring dengan penerapannya, muncul isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi perumus kebijakan subsidi BBM

### Isu-isu Strategis

hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi dinikmati oleh 60% masyarakat yang tergolong mampu

BPH Migas melaporkan terdapat salah sasaran BBM subsidi pada tahun 2021 sekitar 9.000 KL

Terdapat penambahan alokasi belanja subsidi BBM di TA 2022 ini menjadi Rp401,8 triliun

Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin ketersediaan dan pelayanan distribusi BBM Bersubsidi.

Melalui Aplikasi "MyPertamina" sebagai salah satu tool dalam pelaksanaan skema subsidi tertutup diharapkan mampu menasar konsumen secara tepat sasaran sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Persoalannya, bagaimana layanan tersebut dapat menjangkau masyarakat?

Fakta menunjukkan bahwa tidak seluruh konsumen dan SPBU di Indonesia, terutama pada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau belum terhubung dengan jaringan internet. Padahal Pemerintah bertujuan agar BBM subsidi tersebut tepat sasaran, yaitu dapat diterima oleh yang berhak. Sehingga dengan kata lain layanan tersebut secara tidak langsung berpotensi memunculkan ketidakadilan distribusi.

1. Perlu sosialisasi/edukasi terkait aplikasi "MyPertamina";
2. Penting untuk melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah;
3. Sistem yang nantinya akan digunakan distribusi BBM harus disesuaikan dengan kultur masing-masing daerah mengingat kondisi geografis dan kultural Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerah;
4. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembelian alat melalui skema dana service obligation agar yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi tidak kesulitan dalam mengakses aplikasi "MyPertamina".

Rekomendasi

(Tim Puskaji AKN, diolah dari berbagai sumber)

# BURT DPR Soroti Pentingnya Update Data Kepesertaan Program Jamkestama

**W**akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Johan Budi S. Pribowo menyoroti pentingnya melakukan *update* atau pembaruan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP untuk Anggota DPR RI beserta keluarganya. Johan berharap Rumah

Sakit Eka Hospital Cibubur selaku RS *provider* dapat berkoordinasi dengan Asuransi Jasindo selaku penanggungjawab atau operator program Jamkestama, meningkatkan pelayanannya. Salah satunya dengan melakukan *update* data seluruh peserta Jamkestama.

"Soal data kepesertaan yang sudah tidak *update*, saya usul di Jasindo itu ada PIC (person in charge)-nya yang punya pengetahuan yang sama, jangan beda-beda, karena saya pernah mengalaminya, tolong (pembaruan data) itu diperbaiki," pinta Johan saat mengikuti pertemuan Tim Kerja Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Direktur Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur Sheirly Novan Indra beserta jajaran dan perwakilan

Jasindo, di RS Eka Hospital Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Senin (19/9).

Di sisi lain, Johan menyoroti standar operasional prosedur (SOP) petugas yang melayani pasien atau *frontliner* RS Eka Hospital Cibubur. Apakah para petugas tersebut sudah memahami tugas dengan baik, guna mencegah lambatnya penanganan pasien, khususnya untuk peserta Program Jamkestama, karena terhambat administrasi. "Apakah ada dalam sistem di rumah sakit ini soal pergantian Anggota DPR, karena yang saya dengar Jasindo selalu memberikan informasi *ter-update* kepada *provider*, kalau itu tidak *update*, mungkin bisa ada kesalahan komunikasi. Kalau pengetahuan manajemen, kalau pengetahuan *frontliner* sama, maka tidak ada kejadian *miss* komunikasi Bu," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara, Anggota BURT DPR RI Ribka Tjiptaning menilai permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi lagi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, "Berdasarkan UU Rumah Sakit tanpa melihat siapa pun harus dilayani dulu, soal nanti administrasinya *telat* itu, nomor sekian lah, jadi kalau masih ada perdebatan itu aneh," tandas politisi PDI-Perjuangan itu. ● qq/sf

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi.



Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: TAUFIAN/PDT



Foto bersama Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam Pre Event to The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Tangerang, Banten.

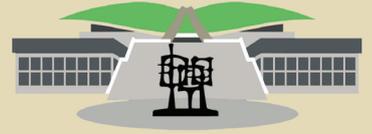
# Sidang P20 Diharap Mampu **Stabilkan Dampak Perubahan Iklim Global**

**K**etua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, tema *Green Economy* atau Ekonomi Hijau dalam sidang Parliamentary Speakers Summit (P20) pada 5-7 Oktober 2022 mendatang merupakan keputusan tepat di saat dunia tengah mengalami kemunduran dalam sisi lingkungan dan juga *renewable energy* (energi terbarukan).

"Oleh karena itu, isu lingkungan akan menjadi isu utama yang akan dibahas dalam P20 mendatang. Seperti yang kita tahu, Indonesia mempunyai lingkungan yang harus menjadi perhatian lebih. Kita harap dengan adanya sidang P20 isu lingkungan bisa menjadi perhatian global untuk bisa pulih dan melakukan perbaikan," kata Fadli dalam Pre Event to The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) di Tangerang, Banten, Kamis (15/9).

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan acara P20 merupakan pertemuan yang akan dihadiri oleh Ketua Parlemen yang terdiri dari seluruh anggota G20 dari berbagai dunia. Dengan mengambil tema 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery' P20 memiliki beberapa isu prioritas yang selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Serda menyampaikan, pada tahun 2021 terjadi bencana akibat perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian hingga Rp544 triliun. Untuk itu diperlukan kesiapan yang matang, yaitu *Green Economy* sebagai bentuk tanggung jawab bersama kepada lingkungan hidup. "Kita harus siap dengan ekonomi hijau jangan sampai perubahan iklim terus membuat masalah untuk itu tema Ekonomi Hijau dalam P20 dinilai sangat penting," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. • **tn/sf**



**Pimpinan BURT DPR RI dan Pimpinan BKSAP DPR RI membuka Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama KWP, bertema Pers Dalam Menyukseskan P20 'Stronger Parliament For Sustainable Recovery' di Bogor, Jumat (16/9).** FOTO: RUNI/PDT



**Foto bersama Pimpinan BURT DPR RI, Pimpinan BKSAP DPR RI, dan peserta Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama KWP, bertema Pers Dalam Menyukseskan P20 'Stronger Parliament For Sustainable Recovery'.** FOTO: RUNI/PDT



**Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sidang Kenegaraan 16 Agustus 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Acara P20 oleh Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal DPR RI, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/9).** FOTO: PRIMA/PDT

